

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS BELANJA SEBAGAI PENILAIAN KINERJA KEUANGAN SEKRETARIAT NEGARA 2014 - 2023

Winda Dwi Deviyanti¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

e-mail: windadwi.2022@student.uny.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan Sekretariat Negara (Setneg) selama periode 2014–2023 melalui analisis rasio efektivitas belanja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder berupa Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Setneg. Teknik analisis data melibatkan penghitungan rasio efektivitas belanja untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tahun dalam periode 2014–2023 menunjukkan kinerja efektif, dengan persentase efektivitas belanja di atas 90%. Namun, terdapat dua tahun, yaitu 2015 dan 2016, di mana kinerja berada pada kategori cukup efektif, dengan persentase masing-masing sebesar 81% dan 80%. Setelah 2016, terjadi peningkatan stabil dalam efektivitas pengelolaan keuangan, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan rasio efektivitas 98%. Tren positif ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran, yang didukung oleh evaluasi dan implementasi kebijakan keuangan yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengendalian internal dan optimalisasi alokasi anggaran untuk meningkatkan efektivitas belanja pada masa mendatang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintahan, khususnya untuk mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Kata kunci: analisis rasio, efektivitas belanja, kinerja keuangan, Sekretariat Negara.

PENDAHULUAN

Anggaran belanja merupakan salah satu elemen utama dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program strategis pemerintah (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023). Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi indikator penting dalam konteks lembaga pemerintahan yang mencerminkan sejauh mana realisasi belanja mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Cahyo, 2023). Sekretariat Negara, sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam penyediaan layanan administratif bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Supriadi & Huseini, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Sekretariat Negara harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Ekombis Review -Jurnal et al., 2021).

Laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai kinerja suatu entitas, termasuk lembaga pemerintahan (Nasution, 2021). Kritik terhadap laporan keuangan instansi pemerintah sering kali muncul akibat keterlambatan penyusunan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, serta lemahnya pengendalian internal (Yulian, 2024). Hal ini berdampak pada kualitas pengambilan keputusan strategis dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Waney et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan instansi pemerintah harus mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel (Sinambela & Pohan, 2016).

Sekretariat Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan keuangan yang akurat dan transparan sebagai lembaga pendukung Presiden Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet, 2023). Peran strategis Setneg terletak pada memastikan pengelolaan keuangan yang efektif guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan (A. Prasetyo & Bramantya, 2020). Evaluasi laporan keuangan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan anggaran memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Rukayah et al., 2017).

Teori akuntansi sektor publik menyatakan bahwa laporan keuangan dalam pemerintahan berfungsi untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Purba & Silitonga, 2022a). Analisis laporan keuangan menggunakan indikator seperti rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio solvabilitas berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan (Dm & Gunawan, 2024). Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik dan mendukung tercapainya transparansi serta akuntabilitas pemerintah (A. S. Ramadhani et al., 2019).

Sekretariat Negara bertugas memberikan layanan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tanggung jawab besar diemban Setneg dalam mengelola anggaran guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menyusun laporan keuangan sesuai SAP, serta memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Setneg menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan tugasnya selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Siregar, 2015).

Pengelolaan anggaran belanja menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja keuangan lembaga pemerintahan (Anggraini et al., 2020). Rasio efektivitas belanja digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran belanja yang telah direncanakan dapat direalisasikan guna mendukung program strategis pemerintah (Ratnasari & Munawaroh, 2019). Evaluasi kinerja keuangan melalui analisis rasio ini tidak hanya mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi juga relevan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik (Fahrevi et al., n.d.). Dengan pendekatan ini, kelemahan dalam perencanaan atau pelaksanaan anggaran dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi laporan keuangan Setneg selama periode 2014–2023 melalui pendekatan analisis rasio keuangan (Rahayu & Siregar, 2023). Fokus penelitian meliputi pengukuran efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Rahma Kumala Dewi et al., 2024). Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penyempurnaan proses pelaporan keuangan, optimalisasi efektivitas belanja guna mendukung program strategis, serta penguatan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran dan aset negara (Lasminiasih & Mulatsih, 2020). Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan pengelolaan keuangan Setneg dan menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut,

Setneg diharapkan lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada salah Lembaga Tinggi Negara yaitu Sekretariat Negara. Objek kajian penelitian merupakan suatu hal utama yang menjadi topik dan inti permasalahan dalam sebuah penelitian. Objek kajian penelitian ini adalah analisis rasio efektifitas keuangan realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja Sekretariat Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat Negara selama periode tahun 2014–2023. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari arsip file laporan keuangan Sekretariat Negara.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data laporan keuangan tahunan Sekretariat Negara. Tahap berikutnya adalah perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja memenuhi anggaran yang direncanakan. Setelah perhitungan dilakukan, hasil rasio dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan tren kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas tersebut (Febrianty Milenia et al., 2022a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi sektor publik mencakup aktivitas pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Aktivitas ini melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan sebagai sarana informasi bagi pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan (Syahril & Ilat, 2016). Konteks pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 meliputi seluruh tahapan mulai perencanaan hingga pengawasan. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi menjamin pengelolaan keuangan yang optimal sebagaimana tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran sektor publik merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan. Anggaran sektor publik adalah rencana keuangan yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran untuk periode mendatang berdasarkan data historis sebagai acuan (Waney et al., 2018). Akuntansi sektor publik berperan penting dalam mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi ekonomi. Proses ini bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana publik di berbagai lembaga pemerintah (W. H. Prasetyo & Nugraheni, 2015). Salah satu implementasi penting dari anggaran sektor publik adalah APBD, yang berfungsi sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah. APBD mencerminkan perkiraan pengeluaran yang diperlukan guna mendanai program dan proyek selama satu tahun anggaran serta memperkirakan sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019). APBD juga berfungsi sebagai alat otorisasi bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembiayaan sesuai rancangan yang telah disetujui oleh DPRD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006).

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran. Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi sumber dana dalam periode tertentu. Ketidaktercapaian anggaran sering mencerminkan kelemahan perencanaan atau pelaksanaan program yang kurang optimal, sebagaimana diungkapkan oleh (Febrianty Milenia et al., 2022a). Efektivitas menjadi salah satu aspek utama yang diukur dalam evaluasi kinerja keuangan. Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan (Nurbaeti, 2020). Efektivitas meningkat ketika kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan semakin besar (Rampengan et al., 2016). Mengukur efektivitas belanja sangat penting dalam menilai seberapa baik anggaran digunakan untuk mendukung program strategis pemerintahan. Perhitungan rasio efektivitas laporan keuangan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan rasio efektifitas laporan keuangan diatas maka hasil perhitungannya akan digolongkan menjadi beberapa kriteria. Kriteria penilaian kinerja efektifitas adalah sebagai berikut.

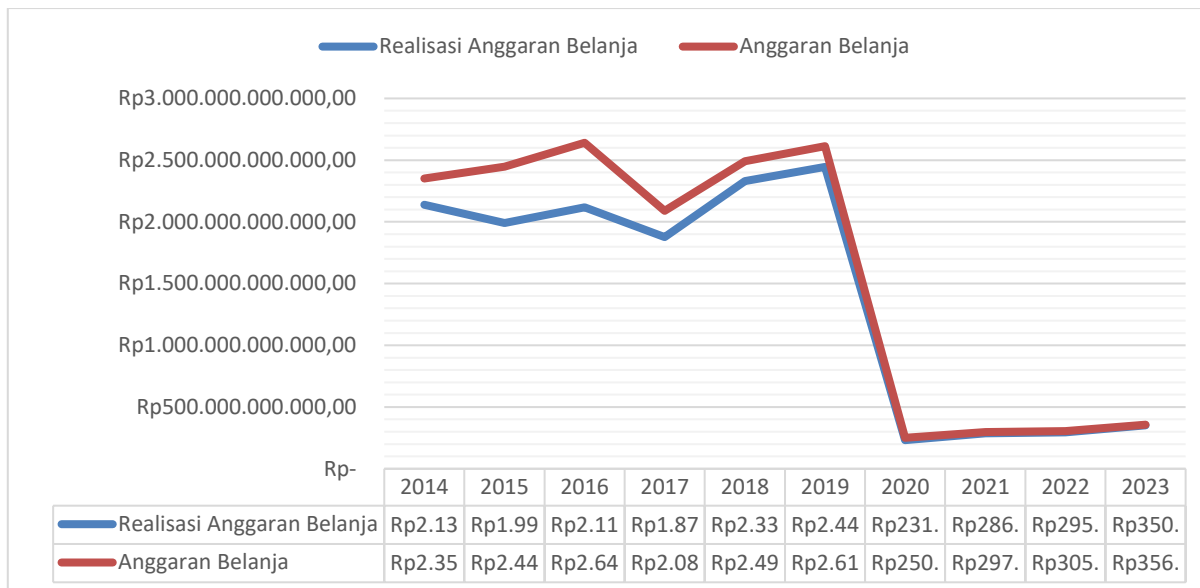
Tabel 1. Kriteria penilaian kinerja efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90 – 100%
Cukup Efektif	80 – 90%
Kurang Efektif	60 – 80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327

Dengan menggunakan rumus perhitungan rasio efektifitas laporan keuangan dan mengelompokkan sesuai kriteria seperti tabel diatas, maka selanjutnya akan disajikan grafik data realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja Sekretariat Negara. Berikut grafik realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja Sekretariat Negara 2014-2023.

Gambar 1. Grafik realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja



Pada gambar 1. Grafik realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja di atas menunjukkan adanya perubahan kinerja efektivitas pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun. Tren yang digambarkan mencerminkan konsistensi pelaksanaan anggaran dalam mendukung program-program strategis yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel sumber data dari grafik di atas.

Tabel 2. Sumber Data

Sumber	Tahun
Kementerian Sekretariat Negara, 2014	2014
Sekretariat Negara, 2015	2015
Sekretariat Negara, 2016	2016
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017	2017
Sekretariat Negara, 2018	2018
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019	2019
Sekretariat kabinet, 2020	2020
Sekretariat Kabinet, 2021	2021
Sekretariat Kabinet, 2022	2022
Kementerian Sekretariat & Negara Republik Indonesia, 2023; Sekretariat Kabinet, 2023	2023

Berdasarkan dari rumus perhitungan rasio efektifitas laporan keuangan dan kriteria penilaian kinerja efektifitas lembaga, maka dapat diukur presentase efektifitas laporan keuangan Sekretariat Negara pada tahun 2014-2023 sebagai berikut.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Laporan Keuangan Setneg 2014-2023

No.	Kategori	Persentase Laporan	Tahun
1.	Efektif	91%	2014
2.	Cukup Efektif	81%	2015
3.	Cukup Efektif	80%	2016
4.	Efektif	90%	2017

5.	Efektif	94%	2018
6.	Efektif	94%	2019
7.	Efektif	92%	2020
8.	Efektif	96%	2021
9.	Efektif	97%	2022
10.	Efektif	98%	2023

Sumber: Data diolah

Hasil analisis rasio efektivitas belanja pada laporan keuangan Sekretariat Negara (Setneg) tahun 2014-2023 menunjukkan bahwa sebagian besar tahun berada pada kategori **efektif**, dengan rasio efektivitas di atas 90%. Kinerja tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan rasio 98%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal. Namun, pada tahun 2015 dan 2016, kinerja berada dalam kategori Cukup Efektif dengan persentase masing-masing sebesar 81% dan 80%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan administratif atau kurangnya efisiensi dalam alokasi anggaran. Setelah tahun 2016, terdapat peningkatan stabil dalam pengelolaan anggaran hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan persentase efektivitas sebesar 98%. Tren positif ini mengindikasikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran setelah tahun 2016, dengan konsistensi kinerja yang berada di atas 90%. Rasio efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana realisasi belanja mendukung tujuan strategis lembaga. Nilai yang tinggi mencerminkan kemampuan Sekretariat Negara dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung program kerja. Standar penilaian berdasarkan (Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996) digunakan untuk mengategorikan kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Milenia et al., 2022b) dan (D. A. S. Ramadhani et al., 2019), yang menggarisbawahi pentingnya efektivitas dalam memastikan pencapaian target belanja pemerintah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Rustanto et al. (2020), yang menemukan bahwa efektivitas belanja merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan, sebagaimana terlihat pada Pemerintah Kota Surakarta tahun 2014–2018, dengan hasil mayoritas berada pada kategori efektif. Purba & Silitonga (2022) juga meneliti hal serupa, yang menunjukkan bahwa efektivitas belanja menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti terlihat pada analisis APBD Kota Medan tahun 2016–2020, dengan mayoritas rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kategori cukup efektif.

Kinerja yang dominan pada kategori Efektif menunjukkan pengelolaan keuangan Setneg selama periode ini dilakukan dengan cukup baik. Target anggaran berhasil tercapai, terutama setelah 2016, yang menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan keuangan. Penurunan efektivitas pada tahun 2015 dan 2016 kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti rendahnya efisiensi alokasi anggaran atau tantangan administratif yang memengaruhi pencapaian tujuan anggaran. Perbaikan yang signifikan setelah tahun 2016 mencerminkan pembelajaran organisasi serta implementasi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Stabilitas kinerja pada kategori Efektif dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas belanja Setneg secara umum mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan

anggaran publik. Peningkatan efektivitas setelah tahun 2016 dapat dikaitkan dengan evaluasi kebijakan yang lebih baik, sebagaimana ditemukan dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan dan penguatan pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah. Sebaliknya, penurunan kinerja pada tahun 2015 dan 2016 dapat dijelaskan oleh kurang optimalnya alokasi anggaran dan tantangan administratif. Hal serupa ditemukan dalam penelitian lain, seperti di Kota Pontianak, yang menunjukkan bahwa rendahnya efisiensi belanja sering terkait dengan proses administrasi yang lambat (Sharini, Kurniawan, et al., 2024). Efektivitas pengelolaan anggaran juga bergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja Setneg yang konsisten pada kategori efektif selama sebagian besar tahun dalam periode penelitian mencerminkan keberhasilan dalam mendukung prinsip-prinsip tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Sekretariat Negara (Setneg) selama periode 2014–2023 sebagian besar berada dalam kategori efektif, dengan rasio efektivitas belanja mencapai lebih dari 90% pada sebagian besar tahun. Peningkatan signifikan terlihat setelah tahun 2016, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan rasio efektivitas 98%. Hal ini mencerminkan perbaikan yang stabil dalam pengelolaan anggaran melalui evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan penguatan pengendalian internal. Namun, penurunan kinerja pada tahun 2015 dan 2016, di mana rasio efektivitas berada dalam kategori cukup efektif (81% dan 80%). Penurunan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efisiensi alokasi anggaran atau tantangan administratif yang memengaruhi pencapaian tujuan anggaran. Namun, setelah tahun 2016, terjadi tren positif yang signifikan dengan peningkatan stabil hingga mencapai efektivitas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 98%.

Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyoroti pentingnya rasio efektivitas belanja sebagai indikator kinerja keuangan, sekaligus menegaskan bahwa evaluasi berkala dan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel adalah kunci dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan hanya mencakup laporan keuangan tahunan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan fiskal nasional atau dinamika ekonomi global, yang dapat memengaruhi pengelolaan anggaran. Kedua, metode yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, sehingga kurang menggali analisis mendalam terkait hubungan kausal antara kebijakan keuangan dan efektivitas belanja. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada Setneg tanpa membandingkannya dengan instansi pemerintahan lain yang serupa, sehingga ruang lingkup generalisasi temuan menjadi terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode yang lebih komprehensif, seperti analisis regresi atau studi komparatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas belanja. Selain itu, evaluasi kebijakan yang lebih spesifik pada tahun-tahun dengan penurunan kinerja dapat memberikan wawasan tambahan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Stabilitas kinerja yang dominan dalam kategori efektif juga menunjukkan bahwa Setneg telah mampu mengelola keuangan dengan cukup baik, sesuai dengan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk memperkuat capaian ini, Setneg perlu terus meningkatkan pengendalian internal, memastikan efisiensi alokasi anggaran, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan. Selain itu, fokus pada optimalisasi belanja strategis akan sangat mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dengan tata kelola yang baik, Setneg dapat menjadi contoh pengelolaan keuangan yang efektif di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Meita, A., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi metode balanced scorecard sebagai tolok ukur pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58–70.
- Cahyo, P. N. (2023). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 3(2).
- Dm, R., & Gunawan, A. (2024). Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Bank Neo Commerce TBK. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(2), 318–333. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index>
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang efisien pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Ekombis Review -Jurnal, J., Ekonomi, I., Bisnis, D., & Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *Journal Ekombis Review*, 9(2), 241–254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1335>
- Fahrevi, M. R., Safitri, N., Ardhiansyah, A., & Akbar, M. B. (2024). Perkembangan Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Publik Dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Media Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 7–14.
- Febrianty Milenia, A., Lisbet Sibarani, J., & Hidayat, A. (2022a). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022b). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2).
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) TA 2014 Audited*.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Ringkasan Laporan Keuangan 2017 Audited*.
- Kementerian Sekretariat, & Negara Republik Indonesia. (2023). *LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA BA 007*.
- Kepmendagri No 690.900.327. Tahun. (1996). *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Menteri Dalam Negeri.
- Lasminiasih, & Mulatsih. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Kasih Indonesia Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas. *Universitas Gunadarma Jurnal*, 14.
- Nasution, R. H. (2021). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan PT KMI Wire Cable TBK. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i3>
- Nurbaeti. (2020). *Analisis efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasetyo, A., & Bramantya, A. R. (2020). Peran Sistem Informasi Manajemen Kearsipan: Studi Kasus Kementerian Sekretariat Negara RI. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 3(2), 74–85.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2015). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Koa Magelang Periode 2015 - 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1).
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2022a). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4.
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2022b). Analisis rasio keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Medan tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Prima*, 4(1).
- Rahayu, R. S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis rasio keuangan dalam memprediksi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).

- Rahma Kumala Dewi, S., Ramli, R., & Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo, F. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. *YUME : Journal of Management*, 7(2), 1134–1145.
- Ramadhani, A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1).
- Ramadhani, D. A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1).
- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dinas sosial Kabupaten Berau. *JEMMA: Jurnal of Economic, Management, and Accounting*, 2(1).
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor badan prijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang. 4(2).
- Rustanto, E. A., Suseno, Y. D., & Sriwidodo, U. (2020). Analisis rasio keunagan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2014-2018. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14.
- Sekretariat kabinet. (2020). Laporan keuangan sekretariat kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. In *Audited) Jl. Veteran Nomor* (Vol. 31, Issue 2020). <http://www.setkab.go.id>
- Sekretariat Kabinet. (2021). Laporan keuangan sekretariat kabinet Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 (Audited). In *Audited) Jl. Veteran Nomor* (Vol. 18). <http://www.setkab.go.id>
- Sekretariat Kabinet. (2022). Laporan keuangan sekretariat kabinet yang berakhir pada 31 desemeber 2022. In *Jakarta Pusat* (Vol. 18). <http://www.setkab.go.id>
- Sekretariat Kabinet. (2023a). Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023. In *Audited) Jl. Veteran Nomor* (Vol. 18). <http://www.setkab.go.id>
- Sekretariat Kabinet. (2023b). Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023. In *Audited) Jl. Veteran Nomor* (Vol. 18). <http://www.setkab.go.id>

- Sekretariat Negara. (2015). *Ringkasan laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara bagian anggaran 007*.
- Sekretariat Negara. (2016). *Ringkasan laporan keuangan sekretariat Negara*.
- Sekretariat Negara. (2018). *Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) TA 2018 Audited*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Laporan Keuangan BA 007 Sekretariat Negara 2019*.
- Sharini, P. A., Kurniawan, R., & Rusliawati. (2024). Economics and Digital Business Review Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 875–883.
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provinsi sumatera utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1).
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Supriadi, H., & Huseini, M. (2020). Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Inovasi Dilingkungan Di Kementerian Sekretariat Negara RI Dilihat Dari Perspektif Knowledge Management. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(2), 63. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Syahril, M. F., & Ilat, V. (2016). Evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelola keuangan dan barang milik daerah (BPKBMD) Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 4(3), 640–649.
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di dinas pertanian dan peternakan provinsi sulawesi utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 334–341.
- Yulian, P. A.-Z. (2024). *Analisis kualitas laporan keuangan dalam upaya peningkatan pencapaian opini badan pemeriksa keuangan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung*. Institut Pertahanan Dalam Negeri.